

---

## PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAERAH DI SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019-2023

Oleh

Andien Paskarina Alberthus<sup>1</sup>, Aldarine Molidya<sup>2</sup>, Maria Indriyani Hewe Tiwu<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

E-mail: <sup>1</sup>[andienalberthus02@gmail.com](mailto:andienalberthus02@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 17-05-2025

Revised: 23-05-2025

Accepted: 20-06-2025

### Keywords:

*Belanja Pemerintah Daerah, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*

**Abstract:** *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah daerah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019-2023. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan pendekatan Random Effect Model (REM), menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah di sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap IPM secara parsial. Sementara itu, belanja di sektor kesehatan dan infrastruktur tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM secara parsial. Namun secara simultan, ketiga sektor tersebut berpengaruh signifikan terhadap IPM. Temuan ini menunjukkan pentingnya optimalisasi belanja sektor pendidikan sebagai salah satu strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur.*

---

## PENDAHULUAN

Pembangunan secara umum dapat didefinisikan sebagai proses memanusiakan manusia dimana proses tersebut merupakan upaya yang sistematis dan saling berkesinambungan sehingga menjadi suatu kondisi yang dapat menyediakan berbagai macam alternatif pilihan bagi pencapaian aspirasi masyarakat (Mahadiansar dkk., 2020). Tujuan akhir dari pembangunan adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari segi materi, tetapi juga mencakup aspek non-materi seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan yang bersih, dan rasa aman.

Pembangunan manusia adalah suatu proses perluasan pilihan bagi penduduk untuk membangun hidupnya yang dianggap berharga. Pembangunan manusia juga dapat menunjukkan bahwa kemampuan, kreatifitas, dan produktivitas setiap individu yang mengalami peningkatan akan menjadi bagian dari pertumbuhan yang efektif. Menurut UNDP (United Nations Development Programme), pembangunan manusia dapat diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia sebagai tolak ukurnya. Hal ini dikarenakan

Indeks Pembangunan Manusia dapat menggambarkan hasil dari tiga bidang yang ada dalam pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah sebuah indikator yang dibentuk oleh UNDP (United Nations Development Programme). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diciptakan untuk menekankan bahwa manusia dan kemampuan mereka harus menjadi kriteria utama untuk menilai pembangunan suatu negara, bukan hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi saja. Dimensi-dimensi dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia meliputi umur panjang dan sehat, pengetahuan yang luas, serta standar hidup yang layak (Lie dkk., 2022). Upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di daerah dapat melalui kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah melalui penganggaran. Hal ini berkaitan dengan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui desentralisasi dan otonomi daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. UU No. 33 Tahun 2004 dibuat untuk mengganti dan menyempurnakan sistem perimbangan keuangan yang sebelumnya diatur secara terbatas dalam UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah.

Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang dikenal dengan nama "Flobamorata" terdiri dari 21 Kabupaten dan 1 Kota dengan Kota Kupang sebagai ibukota provinsi. Provinsi ini memiliki keanekaragaman budaya dan alam yang kaya, dengan potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Meskipun demikian Nusa Tenggara Timur menghadapi berbagai tantangan sosial ekonomi. Tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur masih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Pada tahun 2023, Nusa Tenggara Timur memiliki tingkat kemiskinan sebesar 19,96%, sementara rata-rata nasional adalah 9,36%. Pada akhirnya, masalah ini berlanjut dengan kemiskinan, gizi buruk, angka putus sekolah, dan akses yang buruk terhadap kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Infrastruktur yang memadai meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan akses yang lebih baik ke pendidikan dan layanan kesehatan. Misalnya, jalan dan jembatan memudahkan akses siswa dan pendidik ke sekolah dan tenaga medis ke fasilitas medis di daerah terpencil. Adanya listrik, terutama dengan adanya teknologi dan akses informasi, mempercepat proses pendidikan. Sebaliknya, mendapatkan akses yang memadai

ke air bersih dan sanitasi sangat penting untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mencegah penyakit menular. Secara keseluruhan, peningkatan IPM dapat dicapai melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik.

Penelitian oleh (Hamid dkk., 2024) dengan judul Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Tahun 2013-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel belanja pendidikan, belanja kesehatan, variabel pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM Sulawesi Barat tahun 2013-2022. Artinya meskipun terdapat alokasi anggaran di sektor-sektor tersebut, dampaknya belum secara langsung dirasakan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dalam IPM. Sedangkan Variabel belanja infrastruktur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM Sulawesi Barat tahun 2013-2022. Investasi di sektor infrastruktur, seperti pembangunan jalan, fasilitas umum, dan sarana pendukung lainnya, mampu mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat secara lebih nyata dalam jangka pendek. Dengan demikian, belanja infrastruktur dapat dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan IPM di Sulawesi Barat.

Penelitian lainnya oleh (Maryozi dkk., 2022) juga melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pengeluaran Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Jalan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran bidang pendidikan, pengeluaran bidang kesehatan dan infrastruktur jalan secara serempak atau bersama-sama mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Riau. Artinya, kenaikan pada belanja pemerintah pada bidang pendidikan, pengeluaran bidang kesehatan dan infrastruktur jalan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau.

Dari fenomena dan research gap penelitian terdahulu, peneliti mengambil judul "Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah di Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019-2023". Nusa Tenggara Timur yang berada pada peringkat ke-32 dalam IPM nasional, memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda dibandingkan wilayah lain. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan apakah belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur dapat memberikan dampak signifikan pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Dengan berfokus pada wilayah Nusa Tenggara Timur dan data periode 2019-2023, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan (gap) dalam literatur yang belum banyak mengeksplorasi pengaruh belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia di wilayah yang mengalami tantangan pembangunan besar seperti Nusa Tenggara Timur.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam studi kasus yang dimana, peneliti ingin mengetahui secara mendalam mengenai pengaruh belanja pemerintah daerah di sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Nusa Tenggara Timur tahun 2019-2023 serta apakah belanja pemerintah pada tiga sektor tersebut berpengaruh secara bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Nusa Tenggara Timur tahun 2019-2023. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif,

dimana menggunakan metode analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Belanja pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur digambarkan melalui tabel dan grafik dalam analisis deskriptif. Di sisi lain, pengaruh belanja infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia provinsi Nusa Tenggara Timur diteliti melalui analisis inferensial. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Yang dimana, menggunakan dokumen-dokumen yang sudah ada sebagai sumber informasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi data panel yang dimana, data diolah menggunakan Eviews yang memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis simultan terhadap variabel yang ada. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia secara keseluruhan serta kontribusi masing-masing sektor secara individu dengan regresi data panel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Regresi Data Panel

#### 1. Pemilihan Estimasi Data Panel

Terdapat tiga pendekatan dalam analisis regresi data panel yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan juga *Random Effect Model*. Untuk memilih pendekatan yang paling tepat untuk penelitian ini harus dilakukannya uji Chow, Uji Hausman dan juga Uji Breusch-Pagan.

##### a. Uji Chow

Uji Chow bertujuan untuk memilih permodelan yang tepat dalam penelitian antara *Fixed Effect Model* dan *Common Effect Model*.

**Tabel 1 Hasil Uji Chow**

<i>Effect Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>Prob.</i>	<i>Sig.</i>	<i>Keputusan</i>
<i>Cross-section F</i>	153.735306	0,0000	5%	Menggunakan FEM
<i>Cross-section Chi-square</i>	402.940052	0,0000	atau 0,05	

*Sumber: Data Olahan, 2025*

Hasil uji Chow menunjukkan nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0,0000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini berarti hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak, dan model yang lebih tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*. Setelah dilakukan Uji Chow, perlu dilakukan uji lebih lanjut yaitu Uji Hausman.

##### b. Uji Hausman

Uji Hausman bertujuan untuk memilih antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*.

**Tabel 2**

### Hasil Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-sq. Statistic</i>	<i>Chi-sq. d.f.</i>	<i>Prob</i>	<i>Sig</i>	<i>Keputusan</i>
<i>Cross-section random</i>	0.82913	3	0.8425	5% atau 0,05	Menggunakan REM

*Sumber: Data Olahan, 2025*

Hasil uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0,8425, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini berarti, gagal menolak hipotesis nol ( $H_0$ ). Dengan demikian, model yang lebih tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model*. Setelah dilakukan Uji Hausman, perlu dilakukan uji lebih lanjut yaitu Uji Breusch-Pagan.

c. Uji Breusch-Pagan

Uji Hausman bertujuan untuk memilih antara *Common Effect Model* dan *Random Effect Model*.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Breusch-Pagan (*Lagrange Multiplier*)**

	<i>Cross-section</i>	<i>Time</i>	<i>Both</i>	<i>Sig.</i>	<i>Keputusan</i>
<b>Breusch-Pagan</b>	202.5142	0.830931	203.3451	5% atau 0,05	Menggunakan REM
	0,0000	-0.362	0,0000		

*Sumber: Data Olahan, 2025*

Hasil uji Breusch-Pagan menunjukkan nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0,0000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini berarti hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak, dan model yang lebih tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model*.

2. Hasil Pemilihan Estimasi Data Panel (*Random Effect Model*)

Berdasarkan hasil *output* uji Chow, uji Hausman dan uji Breusch-Pagan (*Lagrange Multiplier*) estimasi model yang tepat dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model*.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji *Random Effect Model***

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
<b>C</b>	61.91801	1.17866	52.53256	0,000
<b>X1</b>	6.97E-12	2.64E-12	2.640348	0.0095
<b>X2</b>	3.83E-12	2.88E-12	1.329289	0.1866
<b>X3</b>	1.03E-12	1.60E-12	0.646896	0.5191

*Sumber: Data Olahan, 2025*

Berdasarkan hasil pengolahan regresi data panel dengan pendekatan *Random*

*Effect Model* maka diperoleh persamaan model regresi antara variabel dependen (indeks pembangunan manusia) dan variabel independen (belanja pemerintah sektor pendidikan, belanja pemerintah sektor kesehatan dan belanja pemerintah sektor infrastruktur) dengan persamaan berikut:

$$Y = 61,918 + 6,97 \times 10^{-12} \cdot X_{1it} - 3,83 \times 10^{-12} \cdot X_{2it} - 1,03 \times 10^{-12} \cdot X_{3it} + \epsilon_{it}$$

Dimana,

Y : Indeks Pembangunan Manusia

X<sub>1</sub> : Belanja Pemerintah Daerah di Sektor Pendidikan

X<sub>2</sub> : Belanja Pemerintah Daerah di Sektor Kesehatan

X<sub>3</sub> : Belanja Pemerintah Daerah di Sektor Infrastruktur

i : 22 Kabupaten/Kota

t : Periode waktu 2019-2023

Berdasarkan persamaan diatas dapat diketahui bahwa nilai konstanta sebesar 61,918. Nilai ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen (belanja pemerintah daerah sektor pendidikan, belanja pemerintah daerah sektor kesehatan dan belanja pemerintah daerah sektor infrastruktur) bernilai nol, maka Indeks Pembangunan Manusia diprediksi sebesar 61,918.

Koefisien untuk variabel X<sub>1it</sub> sebesar  $6,97 \times 10^{-12}$ . Artinya, setiap peningkatan belanja pemerintah daerah di sektor pendidikan sebesar 1 satuan (misal 1 rupiah), dengan asumsi variabel lain konstan, diasumsikan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar  $6,97 \times 10^{-12}$  poin. Hal ini menunjukkan hubungan positif antara belanja pendidikan dan indeks pembangunan manusia, meskipun besarnya pengaruh relatif sangat kecil. Dengan kata lain, semakin tinggi alokasi belanja pendidikan, maka indeks pembangunan manusia cenderung meningkat.

Koefisien untuk variabel X<sub>2it</sub> sebesar  $-3,83 \times 10^{-12}$ . Ini berarti setiap peningkatan belanja pemerintah daerah di sektor kesehatan sebesar 1 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan, justru diasumsikan menurunkan indeks pembangunan manusia sebesar  $3,83 \times 10^{-12}$  poin. Hubungan negatif ini bisa saja terjadi karena efektivitas belanja kesehatan yang belum optimal atau adanya faktor lain yang memengaruhi hasil pembangunan manusia di sektor kesehatan.

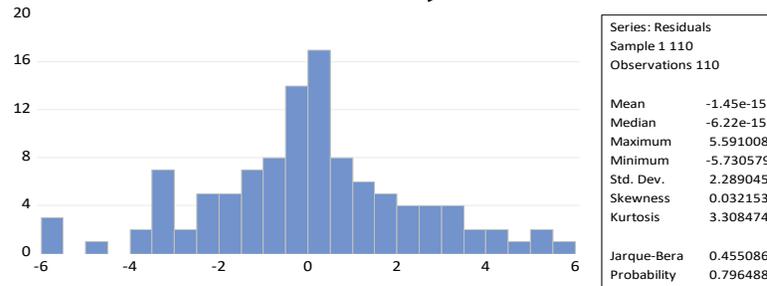
Koefisien untuk variabel X<sub>3it</sub> adalah  $-1,03 \times 10^{-12}$ . Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan belanja pemerintah daerah di sektor infrastruktur sebesar 1 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan, akan menurunkan indeks pembangunan manusia sebesar  $1,03 \times 10^{-12}$  poin. Hubungan negatif ini dapat diartikan bahwa peningkatan belanja infrastruktur belum secara langsung berdampak positif terhadap indeks pembangunan manusia, atau terdapat jeda waktu (*lag*) sebelum dampaknya terasa pada pembangunan manusia.

### Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sisa dari data yang digunakan telah didistribusikan secara normal. Salah satunya adalah dengan melihat Jarque-Bera. Dapat dikatakan berdistribusi normal apabila statistik JB nilainya lebih kecil dari nilai *Chi-Squares* atau probabilitasnya harus melebihi tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ ; 5%.

**Gambar 1 Hasil Uji Normalitas**



*Sumber: Data Olahan, 2025*

Hasil uji normalitas pada Gambar 1, menunjukkan nilai dalam uji statistik dengan hasil *p-value* sebesar 0,796488 yang berarti lebih besar dari nilai signifikansi yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal atau asumsi uji normalitas data terpenuhi.

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji *multikolinearitas* menunjukkan apakah variabel independen memiliki hubungan linier satu sama lain adalah dengan melihat hubungan parsial mereka. Dasar pengambilan keputusan uji *multikolinearitas* dilihat dari nilai *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  dan nilai *variance inflation factor* (VIF)  $\geq 10$ , artinya terjadi *multikolinearitas* sedangkan jika nilai *tolerance*  $> 0,10$  dan nilai *variance inflation factor* (VIF)  $< 10$ , artinya tidak terjadi *multikolinearitas* (Ghozali, 2021).

**Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	VIF	Keputusan
<b>X<sub>1</sub></b>	1.610614	Tidak terjadi gejala <i>Multikolinearitas</i>
<b>X<sub>2</sub></b>	1.756904	
<b>X<sub>3</sub></b>	1.224287	

*Sumber: Data Olahan, 2025*

Berdasarkan hasil pengujian *multikolinearitas* menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), diperoleh nilai VIF untuk variabel X1 sebesar 1,610614, X2 sebesar 1,756904, dan X3 sebesar 1,224287. Karena seluruh nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala *multikolinearitas*.

## Uji Hipotesis

### 1. Uji t (Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen (X) secara individual terhadap variabel dependen (Y). Berikut adalah hasil pengujian seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial melalui uji t. Berdasarkan perhitungan, nilai *t<sub>tabel</sub>* adalah sebesar 1,73406 ( $df = n-k; 22-4 = 18$  dan taraf signifikansi 0,05). Kriteria pengambilan keputusan dari hasil uji t adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $p\text{-value} < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak artinya  $H_1$  diterima (Variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen).
2. Jika nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $p\text{-value} > 0,05$  maka  $H_0$  diterima (Variabel independen secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen).

**Tabel 6 Hasil Uji t**

Variabel	$t_{hitung}$	Prob.	Sig.	Keputusan
C	52.53256	0,000	5% atau 0,05	
X1	2.640348	0,0095		Berpengaruh
X2	1.329289	0,1866		Tidak berpengaruh
X3	0.646896	0,5191		Tidak berpengaruh

Sumber: Data Olahan, 2025

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada tabel 4.10 diketahui bahwa:

1. Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa variabel belanja pemerintah daerah sektor pendidikan ( $X_1$ ) memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,640348 dan  $p\text{-value}$  sebesar 0,0095. Karena  $t_{hitung}$  sebesar 2,640348 lebih besar dari  $t_{tabel}$  (1,73406) dan  $p\text{-value}$  sebesar 0,0095 lebih kecil dari 0,05, maka  $H_1$  diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel belanja pemerintah daerah sektor pendidikan ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
2. Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa variabel belanja pemerintah daerah sektor kesehatan ( $X_2$ ) memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,329289 dan  $p\text{-value}$  sebesar 0,1866. Karena  $t_{hitung}$  sebesar 1,329289 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  (1,73406) dan  $p\text{-value}$  sebesar 0,1866 lebih besar dari 0,05, maka  $H_0$  diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel belanja pemerintah daerah sektor kesehatan ( $X_2$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
3. Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa variabel belanja pemerintah daerah sektor infrastruktur ( $X_3$ ) memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,646896 dan  $p\text{-value}$  sebesar 0,5191. Karena  $t_{hitung}$  sebesar 0,646896 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  (1,73406) dan  $p\text{-value}$  sebesar 0,5191 lebih besar dari 0,05, maka  $H_0$  diterima. Dengan demikian, variabel belanja pemerintah daerah sektor infrastruktur ( $X_3$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

## 2. Uji F (Simultan)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen (X) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y). Berdasarkan perhitungan, nilai  $F_{tabel}$  adalah sebesar 3,16 ( $df(N_2) = n-k; 22-4 = 18$  dan  $df(N_1) = K-1; 4-1 = 3$  dengan taraf signifikansi 0,05). Kriteria pengambilan keputusan dalam uji F adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $sig < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak artinya  $H_1$  diterima (Variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen).
2. Jika nilai  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau  $sig > 0,05$  maka  $H_0$  diterima (Variabel dependen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel independen).

**Tabel 7 Hasil Uji F**

F <sub>hitung</sub>	Prob.	Sig.	Keputusan
4.587285	0.004638	5 % atau 0,05	Berpengaruh secara simultan

*Sumber: Data Olahan, 2025*

Berdasarkan hasil uji F (simultan), diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,004638, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Selain itu, nilai  $F_{hitung}$  sebesar 4,587285 lebih besar daripada  $F_{tabel}$  sebesar 3,16. Dengan demikian, hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_4$ ) diterima. Artinya, secara simultan variabel belanja sektor pendidikan, belanja sektor kesehatan, dan belanja sektor infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada periode 2019-2023. Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi belanja pada ketiga sektor tersebut secara bersama-sama memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di NTT, yang tercermin melalui peningkatan nilai IPM.

### 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R_2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

**Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

<i>R-squared</i>	<i>Adjust R-squared</i>
0.11491	0.08986

*Sumber: Data Olahan, 2025*

Berdasarkan hasil uji, nilai *R-squared* sebesar 0,089860 atau 8,99% menunjukkan bahwa hanya sekitar 8,99% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen, yaitu belanja pemerintah daerah sektor pendidikan ( $X_1$ ), belanja pemerintah daerah sektor kesehatan ( $X_2$ ), dan belanja pemerintah daerah sektor infrastruktur ( $X_3$ ) sedangkan sisanya 91,01% dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel yang diteliti. Karena nilai *R-squared* yang didapat dalam penelitian ini mendekati nol, berarti kemampuan variabel-variabel independen menjelaskan variabel dependen terbatas. Hal ini terjadi karena di dalam model penelitian hanya ada satu variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Nusa Tenggara Timur yaitu belanja pemerintah daerah di sektor pendidikan.

### **Pembahasan**

#### **Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah di Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel Belanja Pemerintah Daerah di Sektor Pendidikan ( $X_1$ ) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) adalah 0,0095, dimana lebih kecil dari batas nilai signifikansi 0,05. Jika dilihat dari perbandingan  $t_{tabel}$  dan  $t_{hitung}$  diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,640348 lebih besar daripada  $t_{tabel}$  sebesar 1,73406. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis alternatif ( $H_1$ ) yang menyatakan bahwa Belanja Pemerintah Daerah di Sektor Pendidikan berpengaruh signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia diterima, sedangkan hipotesis nol ( $H_0$ ) yang menyatakan bahwa

Belanja Pemerintah Daerah di Sektor Pendidikan tidak berpengaruh signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia ditolak. Dapat disimpulkan bahwa Belanja Pemerintah Daerah di Sektor Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019-2023. Peningkatan pengeluaran untuk pendidikan tentunya dapat mendorong peningkatan kualitas SDM di setiap daerah, hal ini tercermin pada rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi sekolah di Nusa Tenggara Timur yang terus mengalami peningkatan. Pendidikan ialah indikator yang memiliki kemampuan untuk mendorong peningkatan kualitas SDM di setiap daerah.

**Tabel 9**  
**Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Nusa Tenggara Timur**

Tahun	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)
2019	7,55
2020	7,63
2021	7,69
2022	7,7
2023	7,82

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan tabel 4.13, menunjukkan data rata-rata lama sekolah di Nusa Tenggara Timur dari tahun 2019 hingga 2023. Data tersebut memperlihatkan adanya tren peningkatan setiap tahunnya, yaitu dari 7,55 tahun pada 2019 menjadi 7,82 tahun pada 2023. Peningkatan rata-rata lama sekolah ini mendukung menandakan pengeluaran untuk pendidikan dapat mempercepat pembangunan sumber daya manusia (SDM) di daerah tersebut.

**Tabel 10**  
**Angka Partisipasi Sekolah di Nusa Tenggara Timur**

Tahun	Angka Partisipasi Sekolah (%)			Jumlah Penduduk Usia (Jiwa)		
	7-12 tahun	13-15 tahun	16-18 tahun	7-12 tahun	13-15 tahun	16-18 tahun
2019	98,45	95,08	75,04	715.600	363.700	332.100
2020	98,49	95,25	74,92	713.900	360.600	333.300
2021	98,42	95,32	75,77	710.100	356.100	338.200
2022	98,59	94,83	75,55	702.264	335.229	337.062
2023	98,62	94,89	75,93	694.500	325.757	338.560

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan tabel 10 angka partisipasi sekolah untuk kelompok usia 7-12 tahun terus meningkat dari 98,45% pada 2019 menjadi 98,62% pada 2023. Kelompok usia 13-15 tahun juga mengalami kenaikan dari 95,08% pada 2019 menjadi 94,89% pada 2023, meskipun fluktuatif, namun tetap berada pada angka yang tinggi. Untuk kelompok usia 16-18 tahun, partisipasi sekolah naik dari 75,04% pada 2019 menjadi 75,95% pada 2023.

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada masing-masing kelompok usia,

terlihat bahwa meskipun jumlah penduduk usia sekolah cenderung menurun setiap tahunnya, angka partisipasi sekolah tetap meningkat atau stabil pada tingkat yang tinggi. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun menurun dari 715.600 jiwa pada 2019 menjadi 694.500 jiwa pada 2023, namun angka partisipasi sekolah justru meningkat. Hal serupa juga terjadi pada kelompok usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun, di mana jumlah penduduk menurun tetapi persentase partisipasi sekolah tetap tinggi atau meningkat.

Data pada tabel 10 menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah di Nusa Tenggara Timur cenderung stabil dan berada pada kisaran yang tinggi, meskipun tidak selalu mengalami peningkatan setiap tahun. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan pengeluaran pendidikan telah berhasil menjaga tingkat partisipasi sekolah tetap tinggi, yang merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan kualitas SDM di daerah tersebut.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori kebutuhan dasar Todaro dan Smith (2020) mempertegas bahwa pendidikan adalah salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas hidup dan mempercepat pembangunan manusia. Teori Gunnar Myrdal turut menguatkan temuan ini dengan menyatakan bahwa pendidikan sebagai kebutuhan dasar adalah salah satu instrumen penting untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan dalam pembangunan ekonomi. Selain itu, menurut prinsip pembangunan berkelanjutan, aspek sosial harus menjadi prioritas, termasuk keadilan dalam akses pendidikan sebagai upaya mengurangi ketimpangan sosial. Oleh karena itu, peningkatan belanja pemerintah di sektor pendidikan tidak hanya berdampak pada peningkatan IPM, tetapi juga mendukung terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam aspek sosial dan ekonomi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh (Maryozi dkk., 2022) dengan judul Pengaruh Pengeluaran Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Riau, yang memperoleh hasil Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. Pendidikan ialah sebuah indikator yang dapat mendorong peningkatan kualitas SDM di setiap daerah, seperti dijelaskan sebelumnya pada saat pengeluaran pendidikan ditingkatkan tentunya hal tersebut dapat mendorong peningkatan mutu SDM itu sendiri.

### **Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah di Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, dapat di lihat bahwa nilai signifikansi variabel Belanja Pemerintah Daerah di Sektor Kesehatan ( $X_2$ ) terhadap Indeks Pembangunan Manusia ( $Y$ ) adalah 0,1866, dimana lebih besar dari batas nilai signifikansi 0,05. Jika dilihat dari perbandingan  $t_{tabel}$  dan  $t_{hitung}$  diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,329289 lebih kecil daripada  $t_{tabel}$  1,73406. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis alternatif ( $H_2$ ) yang menyatakan bahwa Belanja Pemerintah Daerah di Sektor Kesehatan berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia ditolak, sedangkan hipotesis nol ( $H_0$ ) yang menyatakan bahwa Belanja Pemerintah Daerah di Sektor Pendidikan tidak berpengaruh signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia diterima. Dapat disimpulkan bahwa Belanja Pemerintah Daerah di Sektor Kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi

Nusa Tenggara Timur tahun 2019-2023.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dalam periode penelitian belum cukup efektif dalam meningkatkan IPM. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan dan ketimpangan infrastruktur maupun fasilitas kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan yang masih dibawah standar nasional.

Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia 2023 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ketersediaan fasilitas kesehatan di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Berdasarkan data resmi Kementerian Kesehatan, jumlah puskesmas di Nusa Tenggara Timur tercatat sebanyak 390 unit. Dengan jumlah kecamatan yang ada, rasio puskesmas per kecamatan di Nusa Tenggara Timur adalah 1,04, sedikit di bawah rata-rata nasional yang mencapai 1,16. Artinya, hampir setiap kecamatan di Nusa Tenggara Timur memang sudah memiliki satu puskesmas, namun masih ada kecamatan yang belum terlayani secara optimal, terutama di wilayah kepulauan dan terpencil. Persentase puskesmas tanpa dokter di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 adalah 30,0%. Angka ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga puskesmas di Nusa Tenggara Timur masih belum memiliki dokter, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 8,4%. Rasio fasilitas kesehatan di Nusa Tenggara Timur masih jauh di bawah rata-rata nasional. Jumlah puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan penunjang di Nusa Tenggara Timur termasuk yang terendah di Indonesia, baik dari sisi jumlah maupun distribusi geografisnya. Selain itu persentase puskesmas tanpa dokter di Nusa Tenggara Timur juga masih tinggi dibandingkan provinsi lainnya, sehingga kualitas layanan kesehatan dasar belum optimal.

Nusa Tenggara Timur memiliki tantangan geografis berupa wilayah kepulauan, pegunungan, dan akses transportasi yang sulit. Hal ini menghambat distribusi logistik kesehatan, tenaga medis, serta pelaksanaan program kesehatan secara merata. Puskesmas dikatakan memenuhi standar jika memiliki minimal 9 jenis tenaga kesehatan, yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, dan tenaga analis kesehatan. Standar nasional juga mengacu pada rasio tenaga kesehatan per jumlah penduduk atau per fasilitas, seperti rasio dokter per 100.000 penduduk, yang digunakan sebagai tolok ukur nasional dalam pemerataan dan kecukupan tenaga kesehatan di seluruh provinsi. Menurut laporan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2023 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, persentase puskesmas dengan 9 tenaga kesehatan sesuai standar nasional di Nusa Tenggara Timur sebesar 13,1% yang dimana lebih rendah dibandingkan dengan persentase puskesmas dengan 9 tenaga kesehatan sesuai standar nasional untuk rata-rata nasional yang sebesar 30,7%.

Ketersediaan tenaga dokter di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih jauh tertinggal dibandingkan dengan rata-rata nasional. Pada tahun 2023, rasio dokter di NTT tercatat hanya 10,6 dokter per 100.000 penduduk. Angka ini sangat jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 21,4 dokter per 100.000 penduduk. Dengan demikian, jika puskesmas di Nusa Tenggara Timur tidak memenuhi standar minimal 9 jenis tenaga kesehatan atau rasio tenaga kesehatan per penduduk masih di bawah rata-rata nasional, maka dikategorikan belum memenuhi standar nasional.

Meskipun demikian, menurut teori Todaro dan Smith, kesehatan tetap merupakan

bagian integral dari kebutuhan dasar, yang apabila dikelola secara optimal akan berkontribusi besar terhadap pembangunan manusia (Todaro & Smith, 2020). Penelitian ini selaras dengan penelitian oleh (Hamid et al., 2024) mengenai Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Barat, dimana belanja kesehatan di Kabupaten provinsi Sulawesi Barat belum mampu untuk membantu meningkatkan indeks pembangunan manusia selama tahun 2013-2022

### **Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah di Sektor Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, dapat di lihat bahwa nilai signifikansi variabel Belanja Pemerintah Daerah di Sektor Infrastruktur ( $X_3$ ) terhadap Indeks Pembangunan Manusia ( $Y$ ) adalah 0,5191, dimana lebih besar dari batas nilai signifikansi 0,05. Jika dilihat dari perbandingan  $t_{tabel}$  dan  $t_{hitung}$  diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,646896 lebih kecil daripada  $t_{tabel}$  1,73406. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis alternatif ( $H_3$ ) yang menyatakan bahwa Belanja Pemerintah Daerah di Sektor Infrastruktur berpengaruh signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia ditolak, sedangkan hipotesis nol ( $H_0$ ) yang menyatakan bahwa Belanja Pemerintah Daerah di Sektor Infrastruktur tidak berpengaruh signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia diterima. Dapat disimpulkan bahwa Belanja Pemerintah Daerah di Sektor Infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019-2023. Hal ini disebabkan karena infrastruktur di Nusa Tenggara Timur seperti jalan, listrik, dan air bersih, masih tergolong rendah baik dari segi ketersediaan maupun kualitas. Jaringan jalan di Nusa Tenggara Timur belum memadai dan tersebar tidak merata.

Dari total ruas jalan provinsi sepanjang sekitar 2.800 km, hanya sekitar 41% yang dalam kondisi baik, sementara 59% mengalami kerusakan ringan hingga berat. Selain itu, efek pembangunan infrastruktur terhadap IPM baru terasa dalam jangka panjang. Sedangkan, periode waktu 2019-2023 terlalu singkat untuk menunjukkan dampak yang signifikan, terutama jika proyek baru selesai pada akhir periode tersebut.

Rasio elektrifikasi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 telah mencapai sekitar 94,04% hingga 95,15%, angka ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang hampir mencapai 99,63%. Dari total 3.442 desa di Nusa Tenggara Timur, masih ada sekitar 215 desa yang belum teraliri listrik dan sedang dalam proses pembangunan jaringan listrik, terutama di daerah-daerah terpencil dan 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) yang sulit dijangkau karena kondisi geografis yang menantang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan signifikan dalam akses listrik selama beberapa tahun terakhir, ketersediaan listrik belum merata dan kualitas layanan masih perlu ditingkatkan, yang menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya kualitas infrastruktur di Nusa Tenggara Timur.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan pandangan Rostow dan Musgrave serta Gunnar Myrdal. Dimana, menurut Rostow dan Musgrave pembangunan infrastruktur merupakan komponen vital pada tahap awal dan menengah pembangunan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Dalam perspektif Gunnar Myrdal, infrastruktur juga merupakan bagian dari kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar masyarakat, terutama kelompok miskin, dapat menikmati pembangunan secara adil.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian oleh (Maryozi dkk., 2022) mengenai Pengaruh Pengeluaran Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Riau, dimana belanja infrastruktur di Provinsi Riau belum mampu untuk membantu meningkatkan indeks pembangunan manusia.

### **Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah di Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Berdasarkan hasil penelitian uji F, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,004638 yang lebih kecil dari 0,05, serta nilai  $F_{hitung}$  sebesar 4,587285 yang lebih besar dari  $F_{tabel}$  sebesar 3,16. Dengan demikian, hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_4$ ) diterima, yang berarti bahwa belanja pemerintah daerah di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2019-2023. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia tidak hanya bergantung pada satu sektor saja, melainkan memerlukan sinergi lintas sektor agar peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat tercapai secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pengeluaran di sektor pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap IPM. Pendidikan merupakan komponen inti dari pembangunan manusia karena secara langsung mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM). Selama periode penelitian, peningkatan alokasi anggaran untuk pendidikan di Nusa Tenggara Timur tercermin pada meningkatnya indikator pendidikan seperti Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Peningkatan rata-rata lama Sekolah ini juga didorong oleh perubahan yang memperpanjang kewajiban belajar dari sebelumnya 9 tahun menjadi 12 tahun, sehingga masyarakat semakin terdorong untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Nusa Tenggara Timur semakin memiliki akses terhadap pendidikan formal, yang akan berdampak pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas masyarakat dalam jangka panjang.

Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan infrastruktur secara parsial justru menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Kondisi ini menggambarkan adanya kendala seperti ketimpangan dan keterbatasan fasilitas kesehatan, kekurangan tenaga medis yang memenuhi standar nasional, serta infrastruktur fisik yang masih kurang memadai dan tidak merata, seperti jaringan jalan maupun listrik yang belum optimal di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur.

Meskipun demikian, belanja pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara bersamaan (simultan) dapat meningkatkan IPM di Nusa Tenggara Timur secara positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa ada sinergi dan interdependensi di antara berbagai bidang, yang saling meningkatkan dampak masing-masing. Infrastruktur yang memadai berfungsi sebagai pendukung utama untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, meskipun secara parsial belum memiliki pengaruh yang signifikan. Misalnya, pembangunan jaringan jalan yang lebih baik dan ketersediaan listrik di daerah terpencil mempercepat akses ke sekolah dan fasilitas kesehatan, meningkatkan efektivitas belanja pendidikan dan kesehatan. Begitu pula, kesehatan yang baik meningkatkan pendidikan dan produktivitas masyarakat secara keseluruhan, sehingga belanja di sektor kesehatan menjadi lebih bermakna dengan

dukungan infrastruktur yang memadai dan pendidikan yang baik.

Penelitian ini memperkuat teori pembangunan berkelanjutan, di mana pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan harus berjalan seimbang (Todaro & Smith, 2020). Sektor pendidikan dan kesehatan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sementara sektor infrastruktur menyediakan fasilitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses layanan publik. Hal ini juga sejalan dengan teori Wagner yang menyatakan bahwa seiring meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, peran dan pengeluaran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, juga semakin meningkat. Dengan alokasi belanja yang tepat pada ketiga sektor ini, pemerintah daerah berkontribusi secara langsung dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mempercepat pencapaian pembangunan manusia secara keseluruhan di Nusa Tenggara Timur.

## KESIMPULAN

Penelitian ini meneliti Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah di Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019-2023. Berdasarkan hasil pengujian dan uji hipotesis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Nusa Tenggara Timur.
2. Variabel pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Nusa Tenggara Timur.
3. Variabel pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Nusa Tenggara Timur.
4. Variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Nusa Tenggara Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ambya. (2023). Ekonomi Keuangan Daerah. CV. Anugrah Utama Raharja.
- [2] Apriska, L., Irwan, M., Suprapti, I. A. P., & Anggara, J. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB). *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 10(1), 1–11. <https://doi.org/10.29303/jseh.v10i1.451>
- [3] Arora, N. K., & Mishra, I. (2022). Current Scenario and Future Directions for Sustainable Development goal 2: a Roadmap to Zero Hunger. In *Environmental Sustainability* (Vol. 5, Issue 2). Springer Nature Singapore. <https://doi.org/10.1007/s42398-022-00235-8>
- [4] Badan Pusat Statistik. (2024). Indeks Pembangunan Manusia 2023. 18, 1–282.
- [5] Boediono. (2021). Teori Pertumbuhan Ekonomi. BPFE.
- [6] Djamhari, E. A., Layyindah, A., & Ramdlaningrum, H. (2020). Kondisi Kesejahteraan Lansia Dan Perlindungan Sosial Lansia Di Indonesia. In *Kondisi Kesejahteraan Lansia Dan Perlindungan Sosial Lansia Di Indonesia*.
- [7] Ghozali. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10 (X, Vol. 196). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- [8] Guntoro, M. (2021). Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi dan demokratisasi. Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, 3(2), 416. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=mF6bdlj8qrYC&oi=fnd&pg=PA3&dq=akuntabilitas+dan+transparansi+dana+bantuan&ots=eAmY321XJ7&sig=gwH9f6GC UUR8zcoYTf1qKpoiTc>
- [9] Hamid, F., Samsir, A., & Alam, S. (2024). Analisis Pengaruh Belanja Infrastruktur Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Barat. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 911–921.
- [10] Harsono, I., Purnama, I., Firmansyah, M., Irwan, M., & Sutanto, H. (2024). The Influence Of Education Expenditure, Health Expenditure And Social Assistance Expenditure On Human Development Index In NTB Province In 2013-2022. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(1), 802–810. <http://journal.yrpiaku.com/index.php/msej>
- [11] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Profil Kesehatan Indonesia.
- [12] Lie, D., Nainggolan, L. E., Nainggolan, N. T., Sembiring, L. D., & Silitonga, H. P. (2022). Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pertumbuhan Ekonomi. CV. Azka Pustaka.
- [13] Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(1), 77–92. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.550>
- [14] Maryozi, Z., B. Isyandi, & Ando Fahda Aulia. (2022). Pengaruh Pengeluaran Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Jalan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 15(1), 1–11. <https://doi.org/10.31849/niara.v15i1.7380>
- [15] Mulkan, H., & Aprita, S. (2023). Hukum Otonomi Daerah.
- [16] Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Tobing, C. E. R. L. (2021). Penelitian Bisnis: Teknik dan Analisa Data dengan SPSS - STATA - EVIEWS. *Madenatera*, 1, 230. [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=T1nJQ0cAAA&&citation\\_for\\_view=T1nJQ0cAAA: D03iK\\_w7-QYC](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=T1nJQ0cAAA&&citation_for_view=T1nJQ0cAAA: D03iK_w7-QYC)
- [17] Pratama, C., & Sumiyarti. (2024). Pengaruh Belanja Kesehatan, Belanja Pendidikan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap IPM Di Provinsi Jawa Barat. *Media Ekonomi*, 31(2), 181–194. <https://doi.org/10.25105/me.v31i2.18510>
- [18] Purnomoratih, Y., & Ramadhani, S. N. (2023). Peran Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi terhadap Pembangunan SDM Kalimantan Selatan. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4(ii), 106–123. <https://doi.org/10.33105/jmp.v4i2.413>
- [19] Setiawan, I., & Johannes, A. W. (2024). Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek. *Rtujuh Media Printing*.
- [20] Solihatun Mardiah, & M. Irwan. (2024). Analysis of the Effect of Infrastructure Development on Economic Growth in Mataram City. *Socio-Economic and Humanistic Aspects for Township and Industry*, 2(2), 290–298. <https://doi.org/10.59535/sehati.v2i2.278>
- [21] Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* 13th Edition. In Pearson

- (Issue 13th Edition). Pearson Education. <https://www.mkm.ee/en/objectives-activities/economic-development>
- [22] UNDP. (1990). Human Development Report.
- [23] United Nation. (2020). World Social Report 2020. In World Social Report 2020. <https://doi.org/10.18356/7f5d0efc-en>
- [24] Wahyudin, Rismaningsih, F., Hernaeny, U., Anggraeni, E., Astuti, F., Saka, B., Hendrayani, E., Oktavia, Y., Indrayana, I. P. T., Nusantari, D. O., Sudirman, Aziza, N., Setiawan, J., & Supriyanto. (2022). Pengantar Statistika 2 (S. Haryanti (ed.)). Media Sains Indonesia.
- [25] Yunus, R., & Anwar, A. I. (2021). Ekonomi Publik. PT. Nasya Expanding Management.
- [26] Indonesia. (1958). Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958.
- [27] Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999.
- [28] Indonesia. (2003a). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. 2(1), 39–45.
- [29] Indonesia. (2003b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- [30] Indonesia. (2004a). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. In Indonesia.
- [31] Indonesia. (2004b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 2004.
- [32] Indonesia. (2005a). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- [33] Indonesia. (2005b). Peraturan Pemerintah Republik 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [34] Indonesia. (2005c). Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- [35] Indonesia. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

